

Pemanfaatan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Oleh:

TRIA WULANDARI

(thriawulandari@gmail.com)

Pembimbing: Drs. H. CHALID SAHURI, MS

Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 - Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Building Fish Landing Places (TPI) that their stimuli are buildings constructed for the fishermen land their catch of fish. These buildings have been built but not yet enabled by the local government, especially the Department of Marine and Fisheries Meranti Islands Regency. This is because the Department has the authority to regulate and supervise the activities of marine and fisheries. Penelitian purpose of this is to know the problems faced by the Department of Marine and Fisheries in the functioning of Fish Landing Places (TPI).

Arrangement is to create a way to make a pekerjaan have goals, direction to be achieved,s by knowing the existing procedures. This study used a qualitative descriptive method. Data were obtained from the interview data, documentary studies, and field observations. Informants in this study are those relating to the discussion of the function of Fish Landing Places (TPI) is.

The results showed that in the discussion of the function of pemanfaatan Fish Landing Places (TPI) is not able to function because of the absence of directives from the central government to the regions, and because of inadequate facilities. Furthermore, the constraints for the fishermen are long distance and weather influences.

Keywords. Place Pendaratn Fish, Function Department, Local Government

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.

Pembangunan yang menyeluruh, terencana dan sistematis sudah dilakukan dan telah menunjukkan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara sadar berencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik kearah masa depan yang lebih baik. Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan Nasional akan terwujud bila adanya kesinambungan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kota.

Keberhasilan suatu daerah dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bagaimanapun juga akan tergantung dan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan daerah itu sendiri. Dalam hal ini daerah tersebut bertujuan pula untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintah

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh pelaksanaan dan kerja sama pemerintah baik pusat maupun daerah yang bekerja mencapai tujuan tersebut.

Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan dan berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan, kedudukan, dan Tugas Pokok dan fungsi organisasi daerah, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Melaksanakan usaha untuk meningkatkan produksi perikanan serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan.
 - b. Membantu melaksanakan

upaya mengatur dan membina sarana dan prasarana salah satunya adalah TPI,PPI, Pelabuhan Perikanan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bedasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kep. Meranti

No.	Jenis Areal	Jumlah
1.	Rawa	4.797 Ha
2.	KJA	70 Unit
3.	Sungai	Km
4.	Tasik	25 Ha
5.	Tambak	228,27 Ha
6.	Kolam	149,69 Ha
8.	Panjang Pantai	Km

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011

Adapun keragaan rumah tangga perikanan dan rumah tangga buruh perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Keragaan Rumah Tangga Perikanan dan Rumah

Tangga Buruh Perikanan Kabupaten Kep. Meranti Tahun 2011

No	Jenis Usaha	Jumlah	
		RTP	RTBP
1.	Penangkapan:		
	-Laut	1995	-
	-Perairan umum	-	-
2.	Pengolahan	247	-
3.	Budidaya :	256	-
	-Tambak	93	-
	-Kolam	229	-
	-Japung	85	-
	Jumlah	2905	-

Laut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini karena wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti ini memiliki kawasan laut yang cukup luas, hampir sebanding dengan jumlah luas daratan kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Laut juga merupakan potensi yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara maksimal demi peningkatan serta kesejahteraan hidup masyarakat, namun dengan semangat baru, kerja keras yang terencana dan konsisten seluruh komponen masyarakat yang terkait di Kabupaten Kepulauan Meranti pasti akan membuahkan hasil yang maksimal.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan membangun Tempat Pendaratan Ikan (TPI) untuk para nelayan yang pulang dari menjaring ikan. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) seharusnya digunakan sebagai tempat pemberhentian bagi para nelayan. Namun pada kenyataann yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di Kecamatan Rangsang, fungsi bangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) untuk pemberhentian para nelayan belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Di

Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang misalnya, ketika penulis melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa orang tokoh masyarakat di Desa Tanjung Samak mengatakan bahwa *keberadaan pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang dibangun pada tahun 2009 hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja dan bangunan yang sudah dibangun tidak digunakan sebagaimana mestinya (wawancara dengan bapak Kamal 12 April 2014)*

Dari gejala yang dipaparkan di atas, maka penulis berasumsi bahwa secara umum Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Rangsang ini belum berfungsi sama sekali dari mulai pembangunan dan timbul permasalahan-permasalahan antara lain:

1. Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan belum dioperasikan sama sekali semenjak pembangunan, hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan yang ada.
2. Bangunan Tempat Pendaratan Ikan belum dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian bagi para nelayan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan belum menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi wilayah tersebut.

Gambaran mengenai fenomena di atas, memperlihatkan adanya kondisi yang belum dapat diperankan secara optimal sebagai sebuah organisasi yang semestinya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif berperan sebagai organisasi terdepan. Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, menarik untuk dicermati keberadaan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai organisasi terdepan dalam melaksanakan pembangunan, dimana dinas tersebut belum dapat mengoperasionalkannya. Seperti mengoperasikan bangunan yang sudah dibangun tapi belum juga dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat. Atas dasar fenomena tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, penulis khusus mengkaji dan meneliti tentang Pemanfaatan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara antara peneliti dengan informan yang sudah ditentukan sebelum melakukan observasi ke lapangan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Untuk memudahkan dalam menganalisa, data yang diperoleh tersebut dipisah-pisahkan sesuai dengan kategori. Untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya. Kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan pemahaman secara mendalam, serta interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian tentang pemanfaatan Tempat Pendaratan Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan

penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas kelautan dalam memanfaatkan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) tersebut. Dalam melaksanakan fungsi organisasinya Informan dalam penelitian yaitu: kepala DISKANLUT kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretaris DISKANLUT kabupaten Kepulauan Meranti, Pegawai DISKANLUT, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan, Bapak Camat Rangsang, Bapak Kepala desa Tanjung Samak dan masyarakat/nelayan, untuk memberikan penjelasan fungsi dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pembantuan pemanfaatan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum berfungsinya TPI tersebut.

1. Pengorganisasian (*Pengaturan*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan gerak dalam rangka pencapaian tujuan, atau dalam rangka pencapaian tujuan dan dalam rangka melaksanakan rencana. Fungsi pengorganisasian sangat penting karena dengan pengorganisasian setiap orang atau setiap pejabat akan mengetahui tugas, fungsi, pekerjaan, berdasarkan hak dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya.

2. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apakah terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang dilaksanakan, tanpa

disertai suatu pengawasan yang insentif maka rencana-rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan.

Pengawasan (*controlling*) bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Dalam perkembangan selanjutnya, pengawasan merupakan suatu pendekatan tersendiri.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan TPI di Kecamatan Rangsang harus berdasarkan surat tugas dari Pusat dan mengetahui bagaimana cara melakukan pengawasan tersebut. Barulah Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melaksanakan pengawasan apabila sudah memiliki surat tugas. Pengawasan bukan hanya mencari kesalahan tetapi berusaha untuk mengetahui apa yang seharusnya diperbaiki jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan adalah untuk mengetahui apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah dan untuk mengetahui kesalahan dan cara menanggulangnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Berfungsinya tempat Pendaratan Ikan (TPI) Di Kecamatan Rangsang.

Dalam setiap badan usaha maupun organisasi, pasti banyaklah kendala maupun faktor-faktor yang mempengaruhi badan usaha maupun organisasi tersebut, termasuk Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan

Rangsang. Beberapa faktor yang mempengaruhi badan usaha tersebut diatas, diantaranya adalah:

1. Koordinasi

Koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan bagian dari unit-unit suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran tujuan organisasi secara efisien. Dalam arti kata lain, koordinasi adalah penyelarasan secara teratur penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasi kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada bawahan oleh manager maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi maka setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Seperti koordinasi pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang sangat diperlukan.

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian sumber daya manusia dan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber.

2. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik jangka pendek maupun jangka penjang dalam agenda pemerintahan suatu organisasi harus

memiliki lebih dibandingkan dengan organisasinya.

Berbagai pendapat mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam pengembangan suatu organisasi, salah satu diantaranya **Flori A Majelis dalam Wilson Bangun (2012:14)** mengatakan sumber-sumber keunggulan kompetif yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia. Pada prinsipnya sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan organisasi, karena kualitas sumber daya yang baik maka pelaksana kegiatan organisasi juga akan berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan kegiatan mengawasi dan mengatur Tempat Pendaratan Ikan (TPI) harus memiliki SDM yang baik agar pelaksana kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan dapat membantu pemanfaat dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam memproduksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi segala aktivitas organisasi, SDM sangat menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas SDM didalamnya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pengaturan dan pengawasan DISKANLUT belum optimal walaupun mereka masih minim pengalaman dalam bidang pengawasan dan pengaturan Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka suatu organisasi itu tidak akan berjalan dengan tujuan karena adanya pengetahuan dan kemampuan dalam bidangnya maka pengawasan dan pengaturan ini akan berjalan dengan baik.

Tabel 1.3 Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Golongan	S L T P	S L T A	D.II	D.IV	S1	S2	Jumlah
1.	IV					1	1	2
2.	III			1		7		8
3.	II		13					13
4.	I							
5.	TH L/P TT	2	13	2	1	1		19
Jumlah		2	26	2	2	9	1	42

3. Sarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi. Begitu juga dengan sarana yang diperlukan oleh Tempat Pendaratan Ikan (TPI), adapun fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yaitu:

1. Untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yang terdiri dari Tempat Pendaratan Ikan (TPI), pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, pabrik es, gudang es, refrigerasi / fasilitas pendingin dan gedung-gedung pemasaran.
2. Untuk pemeliharaan dan perbaikan armada alat penangkapan ikan, ruang mesin, tempat penjemuran alat penangkapan ikan, bengkel, slipways dan gudang jaring.
3. Untuk perbekalan yang terdiri dari tangki dan instalasi air minum serta BBM.

Dalam usaha menjaring ikan para nelayan menggunakan berbagai macam

perlengkapan atau peralatan yaitu dengan menggunakan:

1. Boat atau pompong
2. Perahu
3. Menggunakan jaring yang dipasang ditepi pantai

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah bahwa masyarakat sangat mengharapkan sarana pada Tempat Pendaratan Ikan (TPI) harus benar-benar diperhatikan agar para nelayan tidak kesulitan untuk menaikkan hasil tangkapannya ke (TPI) tersebut, dengan tempat yang memadai dan sarana yang ada, maka nelayan yang menaikkan ikan di pelabuhan-pelabuhan di wilayah mereka menjaring ikan tersebut akan berkurang. Berikut gambar kondisi perahu nelayan di Kecamatan Rangsang:

4. Lingkungan

Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi dengan lingkungan sekitarnya, mengingat wilayah Kecamatan Rangsang yang dengan luas yang terdiri dari 14 kelurahan/desa, dan 28.106 jiwa. Untuk memanfaatkan tempat pendaratan ikan tersebut dinas kelautan dan perikanan tentunya mendapat kendala untuk mengoperasikan atau memanfaatkan wilayah tersebut, karena para nelayan yang terdekat dengan wilayah tersebut hanya sedikit dan untuk menjangkau wilayah ini memakan waktu yang lama dengan jarak tempuh yang jauh, belum lagi melihat kondisi pasang surut air.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pembantuan pemanfaatan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di kecamatan Rangsang belum berjalan secara optimal karena belum adanya arahan atau

kerjasama dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memfungsikan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Dikecamatan Rangsang dan sarana yang belum memadai sehingga membuat para nelayan lebih memilih menaikkan hasil tangkapannya di pelabuhan-pelabuhan lain.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum berfungsinya Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Dikecamatan Rangsang sebagai berikut:

1. Koordinasi yang belum ada dari pemerintah pusat dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan Tempat Pendaratan Ikan dikecamatan Rangsang tersebut sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai karena Kabupaten Kepulauan Meranti baru dimekarkan sehingga masih banyak diperlukan ahli yang berada dibidang tersebut.
3. Sarana dan prasarana yang belum ada diwilayah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) untuk kebutuhan para nelayan dan hal yang sama dialami oleh para nelayan yaitu perlengkapan yang dimiliki oleh nelayan yang kurang memadai sehingga menimbulkan kesulitan bagi para nelayan untuk menaikkan hasil tangkapannya di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) tersebut.
4. Lingkungan diKecamatan Rangsang yang tidak tentu mengakibatkan para nelayan susah menjangkau Tempat Pendaratan Ikan (TPI)

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan atau pertimbangan oleh para

aparapemerintah ataupun Dinas yang terkait dalam memfungsikan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Dikecamatan Rangsang, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar organisasi, baik itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Koordinasi dapat berupa memberikan arahan kepada Dinas untuk memanfaatkan wilayah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Dikecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Perlu adanya kejelasan tentang manfaat dan tujuan dibangunnya Tempat Pendaratan Ikan tersebut supaya masyarakat Khususnya nelayan Memahaminya.
3. Sebaiknya pemerintah daerah dan Provinsi melaksanakan kerjasama memberikan sosialisasi kepada dinas Kelautan dan perikanan agar bis melaksanakan tugas untuk memfungsikan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) tersebut.
4. Perlu meningkatkan peran masyarakat untuk meaksanakan kerjasama dengan pemerintah untuk membuat Tempat Pendaratan Ikan ini berfungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cushway Burry dan Loger ,Derel. 1995. *Prilaku dan Desain Organisasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Dea, Feliatara. 1998. *Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan*. Riau Indonesia: Unri Press
- Hasibuan SP, Malayu. 2005. *Organisasi dan Motivasi Dalam Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan SP, Malayu. 2007. *Manajemen*

Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Heene Aime Dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Jakarta: PT. Refika Aditama

M. Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

Meleong, Lexi J. 199. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nurcholis, Hanif. 2005. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka

Reksohadiprodo Sukanto dan Handoko T.Hani. 2000. *Organisasi Perusahaan Teori Struktur Dan Prilaku*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

R. Terry, George. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT Alumni

Siagian, Sondang. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Subkhi Akhmad dan Jauhar Mohammad. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakakarya

Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Andi

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapan Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press

Toha, Miftah. 2011. *Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : PT. Kencana

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Widjaja. 2003. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rienieka Cipta

_____. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winardi. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada
Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Dokumen-Dokumen:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Skripsi:

Elmita Dianti Casanova. 2011. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.